

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI TAHUN 2020-2024



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Direktorat Konservasi Keaneekaragaman Hayati

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Tahun 2020-2024 disusun sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka meningkatkan kinerja (*performance*) dan akuntabilitas (*accountability*) penyelenggaraan Pembangunan Kehutanan lingkup Direktorat KKH, khususnya pada kegiatan konservasi spesies dan genetik. Renstra Direktorat KKH mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal KSDAE Nomor: P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tahun 2020-2024 yang memberikan acuan dan gambaran pelaksanaan program, kegiatan, dan arah kebijakan pembangunan bidang KKH tahun 2020-2024. Selain itu, Renstra Dit. KKH tahun 2020-2024 tersebut memuat sasaran indikator kinerja kegiatan selama 5 tahun dari tahun 2020-2024 yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen KSDAE.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Akhirnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua agar implementasi dari rencana strategis Direktorat KKH dapat terwujud sebagai sumbangan terhadap pencapaian pembangunan bidang KSDAE secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.

Jakarta, November 2020

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati,



Dr. Indra Exploitasia, M.Si

NIP. 19660618-199203 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.2 Capaian Pembangunan Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati Hingg Tahun 2019

1.3 Potensi dan Permasalahan

BAB II TARGET KINERJA

2.1 Sasaran Program

2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

BAB III STRATEGI PENCAPAIAN IKK

3.1 Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (cascading)

3.2 Target Kinerja

BAB IV PENUTUP

Daftar Tabel

1. Target kinerja Direktorat KKH 2020-2024 berdasarkan sasaran program dan indicator kinerja program
2. Sasaran kegiatan dan indikasi taget dalam program dukungan manajemen
3. IKP dan target kinerja Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 sesuai dengan redesign system program dan penganggaran
4. Indikator kinerja kegiatan konservasi spesies dan genetic tahun 2020-2024
5. Kebutuhan pendanaan pelaksanaan program spesies dan genetic

Daftar Gambar

1. Redisgn system program dan penganggaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Keanekaragaman Hayati yang dimiliki Indonesia merupakan aset negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk dikelola secara optimal dan berkelanjutan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kelimpahan serta jumlah jenis yang banyak dari tumbuhan dan satwa Indonesia menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi ke 3 di dunia. BAPPENAS (2003) mencatat tidak kurang dari 515 spesies mamalia (terbanyak di dunia), 1531 spesies burung (keempat terbanyak), 270 spesies amfibia (kelima terbanyak), 600 spesies reptilia (ketiga terbanyak), 1600 spesies kupu-kupu (terbanyak) dan 20.000 spesies tumbuhan berbunga (ketujuh terbanyak) menghuni habitat-habitat daratan dan perairan di kepulauan nusantara yang luas ini. Data terkini mengenai jumlah burung Indonesia telah dikompilasi ulang oleh Sukmantoro *et al.* (2007), yakni sejumlah 1.598 spesies. Untuk mamalia, data juga telah direvisi menjadi 704 spesies (Maryanto *et al.* 2007). Sementara itu, data spesies-spesies invertebrata lain, ikan, moluska dan terumbu karang belum terdata secara rinci. Dengan kelimpahan yang begitu besar, pemerintah harus menetapkan prioritas dalam pengelolaan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.

Penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan. Dalam menyelenggarakan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE antara lain menjalankan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa Direktorat KKH mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah, serta pelaksanaan konvensi internasional bidang konservasi keanekaragaman hayati. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat KKH menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan konvensi

internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati;

5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan konvensi internasional, pengawetan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati;
6. Supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keamanan hayati di daerah; dan
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari: (1) Subdirektorat Penerapan Konvensi Internasional; (2) Subdirektorat Pengawetan Jenis; (3) Subdirektorat Pemanfaatan Jenis; (4) Subdirektorat Sumber Daya Genetik; (5) Subdirektorat Keamanan Hayati; dan (6) Subbagian Tata Usaha.

1.2 Capaian Pembangunan Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati Hingga Tahun 2019

- ❖ Peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species*

Persentase peningkatan populasi satwa diberikan batasan maksimal 150%, untuk menghindari adanya persentase peningkatan populasi yang terlalu tinggi. Sesuai dengan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 180/IV/KKH/2015, satwa prioritas terancam punah yang dimonitoring populasinya sejumlah 25 spesies. Sampai dengan tahun kelima periode Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2015-2019, capaian

atas indikator peningkatan populasi 25 spesies prioritas terancam punah sudah mencapai 40,77%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 10% maka capaian kinerja sudah mencapai 407,7%. Keberhasilan peningkatan populasi spesies di site monitoring yang dilihat dari penambahan individu baru, juga didukung dengan upaya konservasi yang lain sebagai intervensi pengelolaan.

Peningkatan populasi spesies di suatu habitat atau site monitoring dilihat karena adanya kelahiran maupun penambahan individu didalam suatu populasi karena kegiatan pelepasliaran. Lama waktu perkembangbiakan spesies satu dengan spesies lainnya tidak sama, karena banyak faktor yang menentukan diantaranya seks rasio, struktur umur pada populasi tersebut dan juga gangguan luar seperti kerusakan habitat, ketersediaan pakan dan sebagainya. Sebagian besar satwa yang masuk ke dalam 25 satwa prioritas yang akan ditingkatkan populasinya sampai dengan tahun 2019 pada umumnya memerlukan waktu lama untuk berkembangbiak.

- ❖ Penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi

Target penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi tahun 2018 adalah 6 spesies. Sedangkan pencapaian realisasi penambahan jenis satwa liar terancam punah prioritas yang dikembangbiakkan pada Lembaga Konservasi adalah sebanyak 8 spesies. Capaian realisasi IKK penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi tahun 2015-2019 adalah sejumlah 23 spesies. Realisasi penambahan spesies dengan begitu sudah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu 10 (sepuluh) dengan persentase pencapaian sebesar 230%.

Keberhasilan pencapaian IKK tersebut tidak luput dari peran Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

yang telah memfasilitasi pelaksanaan perlindungan dan pengembangbiakan jenis satwa liar dan tumbuhan alam, selain itu adanya andil besar dari pihak pengelola lembaga konservasi yang telah mengupayakan pengembangan spesies target di lembaga konservasi yang dikelola.

- ❖ Peningkatan sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri

Target kegiatan penangkaran TSL selama 5 tahun (2015-2019) berupa jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam keluar negeri sebanyak 50 unit. Sampai dengan tahun kelima yaitu tahun 2019, jumlah sertifikat jaminan kualitas penangkaran yang telah diterbitkan oleh Dirjen KSDAE sebanyak 79 sertifikat dengan persentase pencapaian 158%. Keberhasilan pencapaian dikarenakan telah dilaksanakan audit massal pada unit penangkaran karang hias sehingga sertifikat jaminan kualitas penangkaran yang terbit meningkat secara signifikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

- ❖ Peningkatan nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting*

Capaian nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* dari tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp. 43.327.000.000.000,- atau sebesar 173,31% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 25 Triliun. Capaian tersebut merupakan devisa negara dari pemanfaatan 13 kelas komoditi yaitu sebagai berikut : Mamalia, Reptil, Amphibi, Burung, Arthropoda, Ikan, Coral, Mollusca, Gaharu, Anggrek, Sonokeling, Pakis, dan Pasak Bumi.

- ❖ Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam

Realisasi PNBP dari Pemanfaatan TSL tahun 2018 sebesar Rp. 92.600.000.000,- atau sebesar 173,31% dari target tahunan (Rp. 10

Miliar/tahun). Nilai tersebut diperoleh dari iuran pemanfaatan TSL dalam negeri dan luar negeri antara lain: iuran izin pengedar (dalam negeri dan luar negeri), izin penangkaran, izin lembaga konservasi, izin pengambilan sampel penelitian, pungutan perdagangan TSL ke luar negeri, pungutan administrasi pemanfaatan TSL serta PNBPN yang berasal dari pungutan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) maupun Taman Nasional.

- ❖ Ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang *valid* dan reliabel

Data dan informasi keanekaragaman hayati (kehati) perlu terus diupayakan untuk dilengkapi, baik keanekaragaman genetik, jenis, habitat, populasi, dan distribusinya untuk sebuah sistem basis data yang mampu menghimpun data dan informasi yang tersebar di berbagai kalangan. Manfaat adanya basis data kehati adalah dapat digunakan sebagai landasan dalam pengelolaan kehati yang ada di Indonesia. Kehati merupakan komponen penting dalam keberlangsungan bumi dan isinya, termasuk eksistensi manusia. Peran langsung kehati diantaranya sebagai sumber pangan, kesehatan/obat-obatan.

Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliabel pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua). Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliabel pada 7 wilayah biogeografi tahun 2018 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 7 paket data, sehingga capaian kinerjanya 100%.

- ❖ Penerbitan *Prior Informed Consent (PIC)* pemanfaatan sumberdaya genetik

Ditjen KSDAE telah melakukan beberapa kegiatan berupa

penentuan PNPB atas pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG), antara lain mendiskusikan dan identifikasi prioritas-prioritas penelitian terkait sumber daya genetik dan biologi molekuler; mendiskusikan kebutuhan pengaturan pengelolaan sumber daya genetik terutama akses, kepemilikan dan kelembagaan pengaturan SDG Indonesia dan mendiskusikan etika penelitian dan manfaat yang didapat untuk Indonesia atas hasil penelitian. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat mengidentifikasi rumusan masukan untuk penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya genetik di tingkat pusat dan daerah terutama untuk kegiatan penelitian. Realisasi Jumlah Prior Informed Consent (PIC) Pemanfaatan Sumberdaya Genetik dari tahun 2015-2019 mencapai 61 PIC dari target yang ditetapkan sebesar 10 PIC, sedangkan persentase capaian mencapai 610%.

- ❖ Hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik
Target jumlah assesment aman lingkungan terhadap produk rekayasa genetik pada Renstra tahun 2015-2019 yaitu sebanyak 20 assesment aman lingkungan PRG dan telah tercapai dengan jumlah assesment aman lingkungan sebanyak 24 assesment. Hal tersebut menandakan bahwa subdit keamanan hayati dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi sebesar 120%.
- ❖ Pembentukan dan pengoperasian sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik
Pembangunan Balai Kliring (*Clearing House*) akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumber daya genetik di tingkat nasional dimaksudkan sebagai media untuk tukar menukar data dan informasi terkait pemanfaatan sumberdaya genetik antar kementerian/lembaga terkait. Kelembagaan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (BKKHI) termasuk didalamnya kelembagaan Balai Kliring Sumber Daya Genetik Akses dan Pembagian Keuntungan (BK SDG) telah ditetapkan

berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.775/MENLHK/KSDAE/KUM.0/9/2006 tanggal 23 September 2016 tentang Kelompok Kerja Balai Kliring Keanekaragaman Hayati.

POKJA BKKHI terdiri dari berbagai pihak terkait penyedia data dan informasi kehati. Salah satu tugas POKJA ini adalah sinergi dan koordinasi dalam operasionalisasi Balai Kliring Kehati termasuk di dalamnya penyusunan sistem data dan informasi kehati nasional BKKHI telah di re-desain dan disesuaikan dengan mandat CBD yaitu adanya konten khusus untuk monitoring implementasi IBSAP.

Telah dibangun Balai Kliring Sumber Daya Genetik Akses dan Pembagian Keuntungan (BK SDG) sebagai mandat dari Protokol Nagoya. Pada tahun 2017, pengembangan Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan ditargetkan dengan membangun sistem perizinan online bagi peneliti untuk memudahkan proses perizinan yang transparan, efektif dan efisien. Output yang diharapkan adalah terbangunnya 1 unit portal balai kliring sumber daya genetik. Dengan demikian target Renstra 2015-2019 telah tercapai dengan persentase capaian 100%.

- ❖ Pembangunan pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (*sanctuary*) spesies terancam punah

Suaka satwa (*sanctuary*) merupakan unit penyelamatan, rehabilitasi serta pengembangbiakan bagi satwa terancam punah yang membutuhkan biaya yang besar mulai dari pembangunannya hingga pengelolaannya. Oleh karena itu, pencermatan terhadap usulan pembangunan suaka satwa serta analisa terhadap kebutuhan suaka satwa bagi satwa tertentu sangat diperlukan. Lebih dari sepuluh usulan pembangunan suaka satwa diusulkan oleh UPT Balai KSDA maupun Balai Taman Nasional.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan suaka satwa, Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan

Hidup mendukung proses penyusunan dokumen rancang bangun suaka satwa. Usulan pembangunan suaka satwa dibahas bersama dengan Species Specialist Group yang sudah dibentuk oleh Direktur Jenderal KSDAE. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sudah terbangun 23 unit sanctuary dengan persentase capaian sebesar 46% jika dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019 sebesar 50 unit.

Permasalahan pencapaian yaitu belum adanya roadmap suaka satwa/*sanctuary* yang menjadi pedoman dan standar untuk pembangunan suaka satwa di UPT. Upaya yang telah dilakukan yaitu melanjutkan koordinasi dengan LIPI, Universitas, NGO dan para ahli dalam penyusunan roadmap suaka satwa.

- ❖ Jumlah kertas posisi Indonesia dalam Pertemuan Konvensi Internasional bidang perundingan perdagangan internasional berbasis keanekaragaman hayati

Kegiatan Peningkatan Kertas Posisi Indonesia dalam Pertemuan Konvensi Internasional Bidang Perundingan Perdagangan Internasional berbasis Keanekaragaman Hayati dilaksanakan di beberapa lokasi tergantung target yang akan dicapai, seperti DKI Jakarta, Bogor, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Yogyakarta, Geneva - Switzerland, Sochi - Rusia, Montreal – Kanada dan Mesir. Jumlah kertas posisi Indonesia dalam pertemuan Internasional bidang perundingan perdagangan Internasional berbasis Keanekaragaman Hayati selama tahun 2015-2019 adalah sebanyak 20 kertas posisi dari target 12 kertas posisi sehingga realisasinya mencapai 166,67%. Keberhasilan pencapaian tersebut disebabkan oleh adanya beberapa pertemuan internasional yang terkait isu – isu strategis untuk mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia yang perlu dihadiri antara lain : *22th Meeting of SBSTTA in Montreal, Canada, The Second Meeting of the Subsidiary Body on Implementation in Montreal, Canada, dan UN Biodiversity Conference (COP 14 Convention*

on Biological Diversity) in Sharm El Sheikh, Egypt.

1.3. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE antara lain dapat diidentifikasi dari isu strategis yang berkembang. Isu strategis tersebut antara lain:

1. Kerusakan habitat akibat pengaruh alam dan manusia

Kerusakan alam di Kawasan konservasi dan pada daerah diluar Kawasan konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dapat diakibatkan pengaruh alam seperti banjir, tsunami, letusan gunung berapi, dan gempa bumi, contohnya yang terjadi di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2018. Selain itu kerusakan alam dapat terjadi akibat pengaruh manusia, akibat perubahan bentang alam dari Kawasan hutan menjadi area terbuka sebagai lahan pertanian, perkebunan, atau pertambangan ilegal yang mengakibatkan serapan air ke dalam tanah berkurang sehingga menjadi potensi bencana apabila terdapat pada bukit dengan kemiringan terjal yang mengakibatkan terjadi bencana longsor ketika intensitas hujan tinggi seperti di Jawa Barat pada tahun 2019 dan Banten pada Tahun 2020.

2. Perdagangan Ilegal Satwa Liar

Pelaku atau barang bukti perdagangan ilegal satwa liar banyak ditemukan pada pusat transportasi publik, baik di udara melalui bandara, di laut melalui pelabuhan, dan di darat melalui terminal-terminal bis antar kota. Sumber satwa liar ilegal biasanya didapatkan dari wilayah timur Indonesia, kemudian didistribusikan ke konsumennya yang berada wilayah barat Indonesia maupun ke luar negeri. Hal ini menjadi perhatian bagi semua aparat penegak hukum, dalam hal ini Ditjen KSDAE bekerja sama dengan Polisi, Aparat Bea Cukai, maupun Aparat Perhubungan

untuk mengamankan dan memberantas perdagangan satwa liar tersebut.

3. Konflik Satwa dan Manusia

Konflik satwa dan manusia biasanya terjadi antara umbrella species (satwa payung) yang keberadaannya dapat mewakili kondisi keanekaragaman hayati di ekosistemnya, seperti Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), Orangutan Borneo (*Pongo pygmaeus*) dengan manusia yang tinggal di sekitar habitatnya. Satwa ini biasanya mencari makanan yang berada di area perkebunan milik manusia karena ketersediaan pakan yang menipis di habitatnya maupun karena habitatnya sudah dirusak oleh manusia. Hal ini menjadi perhatian karena satwa-satwa dilindungi tersebut pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Alternatif-alternatif strategi untuk menghadapi isu-isu strategis tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melindungi potensi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan di hutan konservasi dengan melibatkan keberadaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi karena jumlah SDM yang belum memadai.
2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar serta pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Sasaran Program

Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yaitu: (1) Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati, (2) Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL. (3) Meningkatnya Pemanfaatan TSL secara lestari. dan (4) Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut yang ditargetkan tercapai pada tahun 2024 yaitu: (1) Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati (70 juta hektar), (2) Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran (10,5 Triliun Rupiah), (3) Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL (1.100 Milyar Rupiah), dan (4) Nilai SAKIP pada Direktorat KKH (80 poin).

Berdasarkan Redesign Sistem Program dan Penganggaran pada Tahun 2020, terdapat revisi jumlah Program di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu dari 13 Program menjadi 6 Program, seperti disampaikan pada gambar 1.



Gambar 1. Redesign Sistem Program dan Penganggaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati mengalami perubahan program yang semula dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sekarang menjadi Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada Direktorat KKH Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Target Kinerja Direktorat KKH 2020-2024 berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Basel ine 2019	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati								
1.	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Juta Hektar	28	15,6	29,4	39,7	51,7	70
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TS								
2.	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	Triliun Rupiah	2	2	4,05	6,15	8,3	10,5
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari								
3.	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan TSL	Milyar Rupiah	22	20	20	20	20	20

2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan untuk mencapai target dari Indikator Kinerja Program Konservasi Keanekaragaman Spesies dan Genetik selama tahun 2020- 2024 dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya inventarisasi dan verifikasi perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi, terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan, terjaminnya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari serta terjaminnya pendanaan konservasi kehati yang berkelanjutan. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (65 Juta Hektar), Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (1.800 Entitas), Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (1.000 Entitas), Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (1 Sistem), dan Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun (5 Unit). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat KKH Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Dukungan Manajemen

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan)	Indikasi Target		PN/PB	UKE II
		2020	2024		
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi					
1.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Juta Ha)	15,6	70	PN 6	Direktorat KKH

2.	Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun (unit)	5	5	PN 6	Direktorat KKH
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik Tumbuhan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan					
3.	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (entitas)	1.800	1.800	PN 1	Direktorat KKH
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik Tumbuhan dan Satwa Liar secara lestari					
4.	Jumlah entitas perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (entitas)	1.000	1.000	PN 6	Direktorat KKH
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan					
5.	Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (Mekanisme)	1	1	PN 6	Direktorat KKH

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*)

Sasaran Strategis Kementerian LHK diturunkan menjadi Sasaran Strategis Eselon I yang kemudian diteruskan menjadi Sasaran Kegiatan, dimana masing- masing sasaran memiliki Indikator-indikator yang menjadi target baik Target Kementerian LHK (IKU), Target Program KSDAE (IKP), maupun Target Kegiatan (IKK). Peta sasaran program dan sasaran kegiatan (*cascading*) secara umum ditampilkan pada lampiran 1 sesuai dengan Redesign Sistem Program dan Penganggaran.

3.2 Target Kinerja

Sasaran Program Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati yang mendukung sasaran program Ditjen KSDAE yaitu:

1. Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati
2. Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL
3. Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik di Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

Indikator Kinerja Program (IKP) dari sasaran strategis tersebut diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. IKP dan Target Kinerja Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 sesuai dengan Redesign Sistem Program dan Penganggaran.

No.	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						
1.	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati (juta hektar)	15,6	29,4	39,7	51,8	70

No.	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari Hasil Penangkaran (Triliun Rupiah)	2	4.05	6.15	8.3	10.5
3.	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan TSL (Milyar Rupiah)	20	20	20	20	20

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Program tersebut didukung dan dilaksanakan oleh Direktorat KKH dan 74 satker daerah dan 1 satker pusat. Masing-masing kegiatan mempunyai sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, yang dijabarkan melalui Output (keluaran) pada rencana kerja dan anggaran setiap tahunnya. Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian kinerja kegiatan pada Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

1. *Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik*

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya inventarisasi dan verifikasi perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi, terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan, terjaminnya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari serta terjaminnya pendanaan konservasi kehati yang berkelanjutan. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel 3.

Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)	15,6	29,4	39,7	51,8	70
2.	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (Sistem)	1	1	1	1	1
5.	Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun (Unit)	1	2	3	4	5

Kinerja Kegiatan tersebut sudah selaras dalam pencapaian sasaran kegiatan, sasaran program pada Rencana Strategis Ditjen KSDAE, maupun sasaran strategis pada Rencana Strategis Kementerian LHK.

2. Kerangka Pendanaan

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Konservasi Spesies dan Genetik dalam tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp. 1.040.000.000.000,-. Besaran pendanaan tersebut hanya sebatas untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK dan IKP.

Pendanaan tersebut bisa didapatkan dari sumber APBN, Mitra dan Hibah langsung lainnya yang tidak tercatat di APBN dan dapat dihitung. Kami mencoba untuk menghitung besaran kontribusi pendanaan yang

dihasilkan dari seluruh kerja sama di bidang KSDAE. Apabila target pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja serta target pendanaannya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Tabel 5. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Spesies dan Genetik

Jenis Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
5422- Konservasi Spesies dan Genetik	191.250.000	199.625.000	208.000.000	216.375.000	224.750.000

BAB IV

PENUTUP

Konservasi sumberdaya alam hayati adalah upaya pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang meliputi aspek pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam hayati, yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk tetap mempertahankan atau melestarikan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sehingga secara terus-menerus dapat memberikan manfaatnya dalam mendukung kehidupan umat manusia.

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati, secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah agar kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, berasaskan keserasian dan keseimbangan. Dengan demikian maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati adalah agar keanekaragaman hayati terpelihara dan terlindungi serta dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Rencana Strategis Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Tahun 2015-2019 disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati di unit kerja lingkup

Direktorat Jenderal KSDAE. Rencana Strategis Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati ini diharapkan dapat menuntun seluruh aparat di lingkup Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati untuk berupaya mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati.